

Title	Pekerja Pertanian Beralih ke Jasa
Date	9 Nov 2018
Media	Jawa Pos
Page	6
Author	(rin/c25/oki)
Tone	



# Pekerja Pertanian Beralih ke Jasa

**JAKARTA** – Dalam rentang waktu 2015–2018, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan ada 9,38 juta lapangan kerja baru. Selama 2018 saja, jumlah pengangguran turun 40 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pun berhasil diturunkan menjadi 5,34 persen tahun ini.

Jika pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai target 5,2–5,6 persen, tingkat pengangguran dapat diturunkan menjadi 4,8–5,2 persen. "Penurunan ini dapat dicapai dengan penciptaan kesempatan kerja 2,6–2,9 juta orang," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi kemarin (8/11).

Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja selama lima tahun terakhir adalah 1,99 persen. Bambang berharap Indo-

nesia dapat mencapai target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru tahun depan. Sebab, sampai saat ini tercapai 9,38 juta lapangan kerja baru.

Jika dirunut, penciptaan kesempatan kerja paling rendah terjadi pada 2015, yakni hanya 190 ribu lapangan kerja. Ada beberapa hal yang memengaruhi serapan tenaga kerja kala itu. Antara lain, melemahnya nilai tukar membuat impor bahan baku terganggu. Akibatnya, sektor industri sempat terpukul.

"Kemudian, pengurangan jumlah pekerja cukup besar pada sektor pertanian karena beralih ke jasa," ucap Bambang. Pemerintah juga berharap partisipasi angkatan kerja perempuan semakin membaik. Sebab, selama 20 tahun terakhir, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)

cenderung stagnan.

Pada 2018, buruh laki-laki rata-rata mendapatkan upah Rp 3,06 juta. Sementara itu, buruh perempuan Rp 2,4 juta. Meski upah pekerja perempuan lebih rendah, pertumbuhan upah pekerja perempuan lebih tinggi. Bambang menuturkan, tahun ini pertumbuhan upah pekerja perempuan mencapai 4,3 persen, sedangkan laki-laki hanya 2,3 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, perbedaan upah dan tingkat partisipasi kerja memang masih terjadi. Namun, kesempatan kerja sama-sama terbuka, baik bagi laki-laki maupun perempuan. "Pemerintah juga tidak hanya berfokus ke tingkat partisipasi, tapi juga kualitas dan kuantitas tenaga kerja," ujarnya. **(rin/c25/oki)**